

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap diskusi tentang kekuasaan dalam hubungan internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namun sebenarnya, interaksi utama antarpemerintah dan antarbangsa adalah ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan, dan tentu saja, perekonomian global. Bahkan dalam hubungan antarpemerintah frekuensi transaksi dan peristiwa ekonomi jauh lebih banyak daripada peristiwa militer. Dalam ajang hubungan internasional yang lebih luas yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah, individu, aktor-aktor non-pemerintah dan yang lebih berperan pada saat ini adalah perusahaan multinasional.<sup>1</sup>

Bila dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional mereka ingin memberikan dan membantu negara penerima modal dalam mengatasi berbagai kendala dalam pertumbuhan ekonomi negara di mana perusahaan tersebut berada, antara lain dapat membuka kesempatan lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan atau keterampilan, membantu pengembangan teknologi ataupun alih teknologinya serta meluaskan pasaran internasional. Sudah menjadi umum bahwa negara berkembang umumnya masih kekurangan modal dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, kekurangan tersebut dapat dilengkapi dengan

---

<sup>1</sup>Walter S Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatahan Dunia 2* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 223.

menghadirkan penanaman modal asing yang dimotori oleh PMN yang sedikit banyak mengurangi beban negara penerima modal seperti masalah resiko dalam penggunaannya.<sup>2</sup>

Banyak Perusahaan Multinasional Jepang yang membuka cabang dan membangun industri di Indonesia. Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Hal ini tentu memberikan kontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia karena keberadaan perusahaan Jepang yang membangun industri di Indonesia tentu membuka kesempatan kerja yang luas bagi sumber daya manusia dalam negeri. Lebih lanjut, berdasarkan kutipan yang didapat dari BPKM, perusahaan-perusahaan Jepang mempekerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia. Ini menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor satu di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 20 perusahaan perakitan mobil dan diantaranya terdapat tujuh pabrik perusahaan ternama Jepang yang berhubungan dengan 150 industri komponen pada lapis pertama, dan 350 industri komponen lapis kedua. Salah satunya adalah Toyota Motor Corporation (TMC), merealisasikan investasi pembangunan pabrik perakitan kendaraan (*complete knock-down/CKD*) di Karawang, Jawa Barat. Pabrik kedua yang akan beroperasi di bawah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menyerap investasi sebesar Rp 3,3 triliun, 25% dari total komitmen investasi Toyota Motor Corp di Indonesia yang sebelumnya membangun pabrik di kawasan Sunter Jakarta Utara.<sup>4</sup>

TMC membangun perusahaan PT. Toyota Manufacturing (TMMIN) melalui joint venture, Pemegang Saham Toyota Motor Corporation (95%) PT. Astra International Tbk

---

<sup>2</sup>Aminudduin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 16.

<sup>3</sup>“Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang”, dalam [http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html), diakses 29 Juni 2015.

<sup>4</sup> Ibid.

(5%) Dari komitmen investasi Rp 13 triliun, sebagian sudah digunakan untuk pembangunan dan ekspansi kapasitas pabrik Toyota I dan II di Karawang, Jawa Barat, yang berinvestasi di tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sejumlah model kendaraan pabrikan itu baik di ASEAN maupun global.<sup>5</sup>

Melalui pembangunan pabrik mesin ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tidak hanya akan menambah investasi dan tenaga kerja, namun diharapkan juga akan terus meningkatkan penggunaan dan pendayagunaan produk dan jasa *engineering* lokal dalam kegiatan produksinya sehingga akan meningkatkan kontribusi manufacturing Indonesia dalam mendukung perekonomian nasional.

Selain itu, dengan terus berkembangnya pasar dalam negeri, pembangunan pabrik diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para pelaku usaha industri otomotif untuk terus mengembangkan industri komponen guna memperkuat struktur industri otomotif nasional.

Sejak awal memulai aktivitas ekspor mesin di tahun 1989 hingga kini, TMMI telah mengekspor lebih dari 1,1 juta unit mesin utuh dalam berbagai tipe ke mancanegara. Sementara itu, Kementerian Perindustrian sejauh ini menyatakan akan terus mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dalam negeri, yang hingga saat ini mengalami pertumbuhan cukup pesat, hal tersebut tercermin dari angka penjualan maupun produksi yang semakin meningkat, dimana penjualan kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2013 mampu mencapai 1,2 juta unit dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,1 juta unit. Angka penjualan ini diharapkan akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi Indonesia, Industri komponen juga harus menjadi kekuatan industri kendaraan bermotor nasional. Dengan dukungan industri komponen yang kuat, maka daya saing industri otomotif nasional

---

<sup>5</sup>“Perusahaan Otomotif Jepang Realisasikan Investasi” dalam [http://www.iyaa.com/finance/berita/industri/2525735\\_1232.html](http://www.iyaa.com/finance/berita/industri/2525735_1232.html), diakses 31 Maret 2015.

akan semakin tinggi dengan harapan dapat terus meningkatkan peran produk industri otomotif nasional dalam mengisi pasar domestik maupun global terutama di Kawasan Asia.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan manfaat dari investasi asing langsung yang menghasilkan peningkatan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan berbagai sektor perekonomian yang dapat mensejahterakan rakyat, karena ketersediaan modal yang dapat segera dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasakan sangat tidak memadai, sehingga pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara-negara yang dapat memberikan bantuannya kepada Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti diketahui memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah ataupun dunia usaha swasta dalam negeri sendiri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: tingkat tabungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya yang oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam

---

<sup>6</sup>“Komitmen Investasi Toyota Diapresiasi oleh Menperin”, dalam <http://beritadaerah.co.id/2014/02/26/komitmen-investasi-toyota-diapresiasi-oleh-menperin/>, diakses 11 Maret 2015.

7. Ibid.

cara dan alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan luar negeri diantaranya dengan cara mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perusahaan multinasional yang akan mendirikan industri di negara penerima.

Jepang merupakan investor terpenting bagi Indonesia. Selain itu Jepang masih mendominasi nilai investasi yang tinggi ke Indonesia. Melihat pada hubungan Indonesia dan Jepang, dapat kita lihat bahwa kepentingan ekonomi Jepang di Indonesia memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri otomotif memainkan peranan penting dalam mendorong investasi asing tersebut.<sup>7</sup>

Hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia telah terjalin lebih dari setengah abad. Selama itu pula, Jepang telah turut berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Peran Jepang dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari tiga aspek, meliputi sektor perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Di bidang perdagangan internasional (ekspor-impor), Jepang adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Begitu pula halnya dengan bidang investasi, investor-investor Jepang memainkan peran terbesar dalam penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan membangun industri-industri otomotif melalui perusahaan multinasional. Kemudian, Jepang juga memberikan bantuan dalam jumlah yang besar dalam skema kerjasama ekonomi sebagai upaya mendukung pembangunan di Indonesia.<sup>8</sup>

Salah satu perjanjian antara Indonesia-Jepang dibidang perekonomian adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). Perjanjian tersebut disusun guna

---

<sup>7</sup>Insan Akbar Krisnamusi. "Tiga Tahun Investasi Jepang Tumbuh 700%". *Metro TV News(Online)*, 18September2014, dalam<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/1014/18/293413/tiga-tahun-investasi-jepang-di-indonesia-tumbuh-700%>, diakses 08 Maret 2015.

<sup>8</sup>Budiono. "Peran Jepang dalam Perekonomian Indonesia dan Analisis Dampak Tsunami". *EconocChemist(Online)*, 30Juli2012, dalam<http://econochemist.blogspot.com/2011/05/peran-jepang-dalam-perekonomian>, diakses 31 Maret 2015.

menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak secara fair, seimbang dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitas dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan. Penandatanganan perjanjian tersebut telah oleh baik kepala negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta.<sup>9</sup>

Kesepakatan kerjasama Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang berlaku efektif sejak Juli 2008 pada prinsipnya bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara melalui pembukaan akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang disepakati dalam IJEPA adalah meningkatkan daya saing industri yang selama ini disebut sebagai Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) dan bersifat jangka panjang. Dapat disampaikan, MIDEC merupakan kerjasama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional melalui training, training for trainers, pengiriman expert, kunjungan kerja ke industri-industri, basic study, dan workshop/seminar. “Indonesia menganggap bahwa MIDEC merupakan kompensasi atas pembukaan akses pasar yang termasuk di dalamnya pemberian pembebasan bea masuk melalui suatu skema khusus yang dikenal dengan User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dimana skema USDFS ini hanya ditujukan untuk pengembangan driver sectors, yaitu automotive, electronic, heavy equipment dan energy,” kata Dirjen KII. Dengan demikian, MIDEC dan USDFS merupakan dua isu di dalam kesepakatan IJEPA yang tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>“Analisis Dampak IJEPA”, dalam [www.kemenkeu.go.id/default/files](http://www.kemenkeu.go.id/default/files), diakses 31 Maret 2015.

<sup>10</sup>“RI-Jepang Tingkatkan Daya Saing Industri Melalui Kerjasama MIDEC”, dalam [http://www.academia.edu/6300889/Implementasi\\_IJEPA\\_di\\_Indonesia\\_dalam\\_bidang\\_otomotif](http://www.academia.edu/6300889/Implementasi_IJEPA_di_Indonesia_dalam_bidang_otomotif), diakses 06 Agustus 2015.

Kerjasama MIDEK mencakup dua kegiatan besar, yaitu kegiatan bersifat cross sectoral yang terdiri dari 6 sektor dan kegiatan bersifat spesifik untuk industri tertentu yang terdiri dari 7 sektor. Sektor-sektor yang tergabung dalam cross sectoral adalah metalworking, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion, dan small medium enterprise. Sedangkan, specific sector adalah automotive, electronics, steel, textile, non-ferrous, chemicals, dan Food & Beverages.<sup>11</sup>

Jepang memang merupakan investor potensial bagi Indonesia. Selama kuartal pertama hingga ketiga pada tahun 2014, investasi Jepang di Indonesia tercatat sebesar USD 2,04 milyar. Angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi kedua setelah Singapura yang telah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD 4,89 miliar pada periode yang sama.<sup>12</sup>

Terkait sektor industri, investasi tertinggi Jepang di Indonesia adalah Industri Kendaraan Bermotor, Alat Transportasi dan Industri Logam dengan nilai investasi sebesar USD 880,6 juta, dan Industri Mesin & Elektronik dengan nilai investasi sebesar USD 384,5 juta.<sup>13</sup>

Sementara perusahaan otomotif Jepang lainnya seperti Mitsubishi Motor Corporation, Yamaha Corporation, Nissan Motor Company, Honda Motor Corporation dll terus melanjutkan investasinya di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas produksi serta membangun pabrik mesin. Ekspansi tersebut termasuk dalam rencana jangka panjang.<sup>14</sup>

Dengan adanya Perusahaan multinasional Jepang di Indonesia diharapkan mampu menjadi agen-agen pertumbuhan industri nasional berdasarkan sukarela ataupun melalui

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup> Daud, Ameidyo. 23 Mater 2015. "Jepang Akan Jadikan Indonesia Basis Produksi Otomotif". Kata Data 9Online), dalam <http://katadata.co.id/berita/2015/03/23/jepang-akan-jadikan-indonesia-basis-produksi-otomotif>, diakses 31 Maret 2015.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, pada akhirnya akan terciptanya industri-industri baru yang akan membuka banyak lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan yang berdampak pada kemajuan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perusahaan Multinasional Toyota Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana peran perusahaan multinasional Toyota terhadap pembangunan ekonominegara berkembang ?
2. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia terhadap Perusahaan Toyota dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomiIndonesia?
3. Bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional Toyota terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomidi Indonesia?

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat bahasan penelitian ini masih cukup luas, maka penulis membatasi penelitian tersebut yaitu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kontribusi industri otomotif Toyota bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008 sampai 2015. Karena pada tahun 2008 mulai diberlakukannya perjanjian IJEPA.

### D. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah

yaitu:

**“Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan industri otomotif melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional Toyota bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia?”**

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran perusahaan multinasional Toyota terhadap pembangunan ekonomi negara berkembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran perusahaan multinasional Toyota.

- c. Untuk mengetahui kerjasama pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional Toyota terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara akademik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana program Strata Satu (S1) pada jurusan studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.
- b. Secara teoritis sebagai referensi tambahan bagi pengembangan studi hubungan internasional yang berkaitan dengan masalah yang penulis sedang teliti yaitu mengenai peran perusahaan multinasional Toyota terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
- c. Dapat memberikan kontribusi terutama sebagai penambah wawasan pengetahuan sebagai aspek yang saling berkaitan dalam realita sebagai peristiwa, masalah dan fenomena internasional yang sedang diteliti khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan ekonomi internasional maupun core subjek lainnya yang masih berhubungan.

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1. Kerangka Teoritis

Istilah hubungan internasional mengandung makna yang beragam. Istilah itu tidak saja dipahami secara berbeda-beda oleh para awam (non expert), namun diantara para ahli sendiri juga belum terdapat kebulatan pendapat<sup>15</sup>. Untuk mengetahui pemahaman yang lebih dalam sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan, maka penulis mengutip teori atau pendapat dari para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Adapun beberapa definisi mengenai pengertian hubungan internasional seperti menurut K. J Holsti sebagai berikut :

**hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara, pengkajian Hubungan Internasional termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.**<sup>16</sup>

Masih mengenai istilah hubungan internasional, Teuku May Rudi dalam bukunya yang berjudul *Teori, etika kebijakan hubungan internasional* menjelaskan sebagai berikut:

**hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah Negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara perorangan dari suatu bangsa atau Negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun secara tidak resmi dengan kelompok atau dengan perorangan dari bangsa atau Negara lain.**<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional* (Jakarta: Jayabaya University Press, 1999), hlm.1.

<sup>16</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 33.

<sup>17</sup> Teuku M. Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: Agkasa, 1993), hlm.3.

Hubungan Internasional pada intinya berkaitan dengan interaksi antar anggota-anggota masyarakat atau kesatuan-kesatuan yang terpisah. Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir berbasis bagi publik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan menjadi perhatian berbagai negara, sehingga apapun yang terjadi di satu negara dunia pasti akan mempengaruhi dibagian dunia lainnya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, setiap negara mempunyai tujuan nasional yang ingin diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat di luar wilayah negaranya, amat penting bagi setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional.<sup>18</sup>

Kerjasama Internasional timbul karena adanya kesadaran dari berbagai negara akan pentingnya menjalin hubungan dengan pihak atau negara lain. Hal ini dimotivasi dengan adanya keinginan atau keperluan para anggotanya, dalam buku Koesnadi Kartasasmita mengatakan:

**kerjasama Internasional terwujud atas kepentingan yang sama dan bekerja atas dasar perinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan dalam kerjasama ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral.<sup>19</sup>**

Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan bagi setiap negara terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Masing-masing negara mempunyai kepentingan sendiri yang menentukan sebelumnya dan adapun yang terjadi dalam interaksinya mereka akan menanamkan jenis hubungan satu sama lain yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak-

---

<sup>18</sup> F.X Wawolangi, "Soft Power dalam Politik Luar Negeri", Skripsi FISIP-HI UI (pdf), 2010, dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T+27791-Politik+luar-Tinjauan+literatur.pdf> diakses 7 desember 2014.

<sup>19</sup> Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional* (Bandung: Roda Karya, 1987), hlm.. 30.

pihak tersebut. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ekonomi internasional maka setiap negara harus mampu berintegrasi dengan negara lain dengan bentuk kerjasama untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional masing-masing.

Setiap negara memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, hal ini disebabkan setiap negara tidak akan selalu memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk itu perlu adanya suatu bentuk kerjasama dengan negara lain. Untuk meningkatkan pembangunan perekonomiannya, maka Indonesia harus melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain terutama dengan negara Jepang yang sudah lebih maju ekonominya dibandingkan dengan Indonesia, sebuah upaya untuk mencapai tujuan politik luar negeri jangka menengah dan juga dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyatnya, paling tidak bentuk-bentuk hubungan-hubungan yang berbeda, tetapi pada perisipnya antara negara satu dengan negara lainnya mempunyai ketergantungan.

Antara Indonesia-Jepang telah memunculkan suatu ketergantungan yaitu dengan saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian antara Indonesia-Jepang dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan diantara keduanya. Teuku May Rudi dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional menyatakan bahwa ketergantungan antara Indonesia pada Jepang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Jepang memiliki kapasitas finansial yang besar, namun disisi lain Jepang terbatas pada sumber daya alam yang dimiliki...dengan kondisi tersebut, Jepang mengadakan hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara yang dapat memenuhi kebutuhannya tersebut yaitu salah satunya dengan menanamkan investasi di luar negeri (1993:122).**

Untuk itu Jepang mengadakan hubungan ekonomi dengan Indonesia salah satunya melalui investasi luar negerinya dengan jalan mendirikan perusahaan-perusahaan multinasionalnya di Indonesia.

Menurut Thomas W. Allen bahwa penanaman modal Jepang di Indonesia pada umumnya dilaksanakan berdasarkan usaha patungan dan dikembangkan oleh perusahaan multinasional Jepang sendiri, perusahaan multinasional Jepang melakukannya dengan cara:

1.pembelian pabrik atau alat-alat perlengkapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang 2. Perusahaan-perusahaan perkapalan, asuransi, keuangan yang menyelenggarakan usaha-usahnya melalui afiliasi; 3. Penempatan ahli-ahli(tenaga pimpinan), yang mungkin terdiri dari orang-orang yang akan pensiun; 4. Ekspor kembali ke Jepang beberapa produksi atau dipasarkan kenegara setempat; 5. Barang-barang yang telah diolah menjadi barang jadi yang diimpor kembali ke Indonesia; 6. Segala kegiatan yang membantu perkembangan usaha restoran-restoran, hotel-hotel, kantor-kantor pariwisata, dan usaha lain milik Jepang yang berada di Indonesia.

Dalam hubungan setiap negara di era globalisasi ini, tidak lepas dari kegiatan ekonomi internasional untuk memenuhi kebutuhan domestik, seperti yang dikatakan Paul R. Krugman dan Maurice Obstelddalam bukunya yang diterjemahkan Faisal H. Basri edisi ke dua berjudul Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan mendefinisikan ekonomi internasional adalah

ekonomi internasional adalah persoalan-persoalan yang muncul karena masalah-masalah khusus yang terjadi dalam interaksi ekonomi antar bangsa yang berdaulat dimana motif dan perilaku individu dan perusahaan dalam perdagangan internasional persis sama dengan yang dijumpai dalam transaksi domestik.<sup>20</sup>

Seperti disebutkan di atas bahwa interaksi masyarakat internasional juga meliputi bidang perekonomian. Seperti yang telah dikemukakan oleh **Soediyono. R** dalam bukunya Ekonomi Internasional Pengantar Lalu Lintas Pembayaran Internasional, telah memberikan batasan Ekonomi Internasional sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld, *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan*(Terjemahan Faisal H. Basri ) (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 2-4.

**ilmu Ekonomi Internasional yang sering kita sebut Ekonomi Internasioal kiranya dapat didefinisikan sebagian dari pada ekonomi yang khususnya mempelajari prilaku transaksi ekonomi internasioal perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerja suatu perekonomian dunia pada umumnya.<sup>21</sup>**

Setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran bahkan dengan sumber daya yang seminimal mungkin, manusia dan masyarakat bahkan negara sekalipun tetap bertujuan untuk mencapai kemakmuran yang optimal. Seperti yang dikatakan oleh R. E Mamoer dalam buku **Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, yaitu:**

**tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional merupakan kerjasama bantu membantu antar bangsa atau antar bernegara. Dengan kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan dalam negeri dapat dipenuhi oleh negara lain.<sup>22</sup>**

Ekonomi internasional selalu berhubungan dengan perdagangan internasional karena tidak ada negara yang dapat hidup sendiri.Semua negara berpartisipasi dalam perekonomian dunia dan dihubungkan melalui perdagangan dan finansial.Adapun definisi perdagangan internasional menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld dalam bukunya yang berjudul **Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan** menjelaskan bahwa:

**perdagangan Internasional adalah kegiatan pedagangan dimana antara bangsa dapat melakukan spesialisasi dalam produksinya, dengan demikian akan memperbesar produktifitas sumber daya sehingga akan memperoleh lebih banyak barang dan jasa. Negara-negara melakukan pedagangan internasional karena dua alasan utama : pertama, Negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain, kedua,**

---

<sup>21</sup> Soediyono R, *Ekonomi Internasional Pengantar Lalu Lintas Pembayaran Internasional*, 1985, hal.14.

<sup>22</sup> R. E Mamoer, *Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, 1974, hal 1.

**Negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi.**<sup>23</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, fenomena Politik-Ekonomi Internasional mencatat perkembangan baru yang ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan perannya didalam hubungan ekonomi lintas negara. Salah satu aktor non-negara yang paling menonjol dalam konteks bisnis internasional adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNCs). Dengan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, MNCs mengontrol aliran modal, teknologi dan bahkan distribusi barang melintasi *batas-batas negara*.

Peran perusahaan multinasional Jepang pada pembangunan ekonomi Indonesia sangat diperlukan, tidak dapat dipungkiri peran mereka sangat berarti bagi Indonesia, adapun konsep peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosiologi: suatu peran”, adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>“*Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran*”.

Soejono juga mengatakan bahwa peran meliputi beberapa hal, yaitu:

**peran sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan masyarakat. Peran juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.**<sup>25</sup>

Peran perusahaan multinasional menurut Robert Gilpin dalam buku “US Power The Multinational Corporation”, adalah sebagai berikut: <sup>26</sup> “peran perusahaan antara lain dapat

---

<sup>23</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan* (1992), hlm. 15

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 220.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Robert Gilpin, *US Power The Multinational Corporation* (New York: Basic Books, 1974), hlm. 68.

membuka kesempatan lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan atau keterampilan, membantu pengembangan teknologi ataupun alih teknologinya serta meluaskan pasaran internasional”.

Seperti yang dikutip dari Colman dan Nixon oleh Bob Sugeng Hadiwinata didalam buku Politik Bisnis Internasional, yaitu perusahaan multinasional (PMN) merupakan unit-unit usaha yang memiliki atau mengontrol aset-aset seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, outlet (pusat pembelanjaan) dan perkantoran yang terdapat di dua negara atau lebih negara.<sup>27</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Bob Wiriyahartono dalam bukunya yang berjudul *Belajar dari Jepang Keberhasilan Sebagai Negara Industri Maju di Asia* Menyatakan bahwa sejak Indonesia membuka kembali pintu masuk PMA, Jepang....., telah muncul sebagai salah negara penanam modal terbesar....<sup>28</sup>

Jumlah perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia dalam tahun ini, naik 1,4 kali dibandingkan tahun 2012. Paling banyak dari sektor manufaktur, tetapi bidang jasa akhir-akhir ini juga semakin banyak mengincar Indonesia. Menurut hasil survei Teikoku Data Bank (TDB) yang diumumkan Kamis (19/6/2014) :

**di Indonesia saat ini ada 1.763 perusahaan Jepang, ternyata jumlah perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia itu meningkat 39,3 persen dibandingkan survei Maret 2012 yang hanya sebanyak 1.266 perusahaan. Sebanyak 52,9 persen atau 932 perusahaan adalah perusahaan manufaktur, 34,7 persen meningkat dibandingkan sebelumnya 214**

---

<sup>27</sup> Bob Sugeng Hadiwinata yang dikutip dari Colmsn dan Nixon, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kanisius, 2002), Hlm. 117.

<sup>28</sup> Bob Wiriyahartono, Belajar Dari Jepang Keberhasilan Sebagai Negara Industri Maju di Asia (Jakarta: Salemba Empat, 2003), Hlm. 156.

**perusahaan. Kebanyakan adalah perusahaan yang terkait dengan industri mobil dan motor Jepang.<sup>29</sup>**

Banyak Perusahaan Multinasional Jepang yang membuka cabang dan membangun industri di Indonesia, salah satunya adalah Toyota Motor Corporation, Toyota di Indonesia diwakili oleh Perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang membangun industri otomotif di Indonesia. Melalui pembangunan empat pabrik mesin, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tidak hanya akan menambah investasi dan tenaga kerja, namun diharapkan akan terus meningkatkan penggunaan dan pendayagunaan produk dan jasa engineering lokal dalam kegiatan

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengapresiasi komitmen PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam berinvestasi di tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sejumlah model kendaraan pabrikan itu baik di ASEAN maupun global. Apresiasi itu dilontarkan MS Hidayat sebagai berikut:

**melalui pembangunan pabrik mesin ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tidak hanya akan menambah investasi dan tenaga kerja, namun diharapkan akan terus meningkatkan penggunaan dan pendayagunaan produk dan jasa engineering lokal dalam kegiatan produksinya sehingga akan meningkatkan kontribusi manufacturing Indonesia dalam mendukung perekonomian nasional.<sup>30</sup>**

Dengan terus berkembangnya pasar dalam negeri, pembangunan pabrik diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para pelaku usaha industri otomotif untuk terus mengembangkan industri komponen guna memperkuat struktur industri otomotif nasional.

Jepang merupakan salah satu contoh negara yang paling maju dan berpengaruh di Asia yang mana perusahaan-perusahaan multinasionalnya ada di beberapa negara, khususnya di

---

<sup>29</sup>“Jumlah Perusahaan Jepang Yang Berinvestasi di Indonesia Naik 1,4 Persen”, dalam <http://www.tribunnews.com/internasional/2014/06/20/jumlah-perusahaan-jepang-yang-berinvestasi-di-indonesia-naik-14-kali?page=1>, diakses 29 Juni 2015.

<sup>30</sup>Ibid.

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jepang semakin lama semakin tinggi dan menjadikan industrilisasi tetap berlangsung karena kejelian pengusaha Jepang dalam menanamkan modalnya di Indonesia melalui perusahaan-perusahaannya, khususnya perusahaan-perusahaan otomotif yang sudah dikenal khalayak banyak. Sebagai negara adidaya di kawasan Asia yang mempunyai pengaruh terhadap perekonomian suatu negara, Jepang diharapkan memberikan titik cerah bagi pembangunan di Indonesia melalui investasinya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

**sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Jepang, pemerintah Jepang akan dapat menerima dari pemerintah Jepang sendiri, dan selanjutnya langkah-langkah yang harus dijalankan sesuai prosedur resmi dibawah kerjasama teknik menurut rencana *colombo plan* untuk kerjasama dalam bidang sosial dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Pasifik (JICA: 198).**

Setiap negara memerlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dengan pembangunan ekonomi. Walaupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan pembangunan selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan.

Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Michael P.Todaro dalam buku *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga* edisi ketujuh yang diterjemahkan oleh Drs. Haris Munandar, M.A.pada umumnya didefinisikan sebagaiberikut:

**pembangunan ekonomi adalah sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto**

atau GNP (gross national product) pada tingkat lebih tinggi yang diukur melalui tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kemajuan pembangunan.<sup>31</sup>

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan diatas maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka waktu panjang.

Pembangunan itu sendiri yang dikutip dari **Sadono Sukiro**, dalam buku Ekonomi Pembangunan, Rostow beranggapan bahwa: "*Pembangunan merupakan suatu proses yang akan menciptakan perombakan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial masyarakat.*"<sup>32</sup>

Walaupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan pembangunan selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya.

Setiap negara, khususnya negara yang sedang berkembang berusaha meningkatkan industrinya supaya keterbelakangan, terlebih dibidang perekonomian dapat dihindari dan diatasi dengan baik. Seperti tercantum dalam buku *Industralisasi di Negara-negara Dunia Ketiga*, menurut **Alan B. Mountjoy** yang mengatakan bahwa:

**terdapat berbagai alasan mengapa setiap negara sedang berkembang mengusahakan industrialisasi, diantaranya: pertama, tidak ada suatu negara yang kuat dan aman apabila tidak memiliki sebuah industri yang cukup maju, sebagaimana juga**

---

<sup>31</sup> Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (terjemahan Drs. Haris Munandar, M.A.) (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 17.

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), hlm. 104.

**industrialisasi merupakan penentu nomor satu dari kekuatan ekonomi nasional suatu negara. *Kedua*, industrialisasi menyajikan kemungkinan pemecahan terhadap masalah banyaknya tersedia lapangan kerja terutama negara-negara di kawasan Asia. *Ketiga*, dengan adanya industrialisasi maka ketidak seimbangan dalam pola perekonomian negara yang bersangkutan menjadi kuarang karena terjadinya suatu divertifikasi dan ini membantu pula lahirnya keberdikarian di bidang ekonomi.**<sup>33</sup>

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Pendirian industri penting dalam menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan citra negara di mata investor yang akan menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaan di Indonesia.

pembangunan industri akan membuka ribuan kesempatan kerja bagi masyarakat. Disini berbagai jenis industri akan memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan produksi barang-barang yang dibuat pabrik.<sup>34</sup>

Seiring tumbuhnya industri di kawasan industri tersebut maka akan terbuka beberapa peluang usaha lainnya baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan industri tersebut. Beberapa peluang usaha yang akan tumbuh diantaranya, yaitu jasa perbankan, jasa perdagangan, perumahan, makanan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Alan B. Mountjoy, *Industrialisasi di Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 12.

<sup>34</sup> [http://www.modern-cikande.co.id/lang\\_id/artikel/](http://www.modern-cikande.co.id/lang_id/artikel/). "5 Dampak Positif Adanya Kawasan Industri". Diakses 18 Maret 2015.

<sup>35</sup> Ibid.

Pembangunan industri yang memberikan dampak positif diantaranya, yaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha baru, peningkatan pendapatan daerah, dan peningkatan konsumsi karena banyaknya pekerja yang datang dari sekitar wilayah dekat daerah yang ada kawasan industri. Hal tersebut berakibat positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya dampak positif dengan adanya kawasan industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi masyarakat miskin di daerah. Pemerintah juga diharapkan dapat menetapkan zona kawasan industri sesuai kebijakan industri nasional di berbagai daerah seluruh Indonesia untuk membuka pertumbuhan ekonomi baru.

Berdasarkan paparan diatas yang merupakan kerangka konseptual, maka dapatlah penulis mengemukakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

1. Hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang di bidang industri otomotif akan berpengaruh besar dalam pembangunan industri yang akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.
2. Dengan adanya peran perusahaan multinasional Toyota akan berperan dalam meningkatkan industri otomotif di Indonesia.
3. Pembangunan industri-industri otomotif akan membuka lapangan kerja yang dapat menyejahterakan masyarakat dan menciptakan kawasan industri.
4. Seiring tumbuhnya kawasan industri tersebut maka akan terbuka beberapa peluang usaha lainnya baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan industri.

## 2 . Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**“Peningkatan investasi perusahaan Toyota di Indonesia dalam bentuk pembangunan industri otomotif harus disertai dengan kemudahan birokrasi sehingga dapat mempermudah dalam pembangunan industri otomotif di Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”**

## 3. Tabel Oprasionalisasi Variabel

**Tabel 1**

**Tabel Oprasionalisasi Variabel**

Variabel dan Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verivikasi (Analisis)
-----------------------------------------	------------------------	--------------------------

<p><u>Variabel Bebas:</u></p> <p>Peningkatan investasi perusahaan Toyota di Indonesia dalam bentuk pembangunan industri otomotif harus disertai dengan kemudahan birokrasi</p>	<p>1.Peningkatan Investasi</p> <p>2.Kemudahan Birokrasi</p> <p>2.1.Peringatan Pajak Pagi Investor Asing</p>	<p>1.Dalam Perjanjian IJEPA terdapat kerjasama dalam bidang investasi dan pengembangan industri otomotif (<a href="http://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatakan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-IJEPA">http://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatakan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-IJEPA</a>)</p> <p>2.1Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2015, yang dibuat berdasarkan instruksi Presiden, berlaku efektif dan mengurangi persyaratan keringanan pajak (termasuk diskon untuk pajak pendapatan perusahaan untuk sebuah periode spesifik) untuk investasi lokal dan asing. Sebelumnya, para investor diberikan keringanan pajak bila mereka berinvestasi minimal Rp 1 triliun. Meskipun kebijakan sejenis ini mengimplikasikan bahwa pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan pajak, hal ini juga akan meningkatkan aktivitas perekonomian di negara</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>ini. Berbeda dengan situasi sebelumnya, PP baru ini tidak menempatkan batasan minimal yang jelas untuk ukuran investasi dalam rangka bisa mendapatkan keringanan pajak. (<a href="http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/pajak-indonesia-mendongkrak-pendapatan-pajak-melalui-kebijakan-baru/item5545">http://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/pajak-indonesia-mendongkrak-pendapatan-pajak-melalui-kebijakan-baru/item5545</a>)</p> <p>2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal (<a href="http://www.menpan.go.id/tentang-kami/kedeputian/pelaya">http://www.menpan.go.id/tentang-kami/kedeputian/pelaya</a>)</p>
--	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		nan-publik/35-berita/liputan-media/1171-satu-atap-versus-satu-pintu)
<p><u>Variabel Terikat:</u></p> <p>Sehingga dapat mempermudah dalam pembangunan industri otomotif di Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia</p>	<p>1.Pembangunan Industri Otomotif</p>	<p>1. Empat pabrik yang dibangun TMMIN, dua di antaranya berlokasi di Jakarta Utara atau Plant I Sunter dan Plant 2 Sunter. Sedangkan dua lagi di Jawa Barat yaitu Plant 1 Karawang dan Plant 2 Karawang. Pabrik pertama yang dibangun adalah Plant 1 Sunter yang sudah</p>

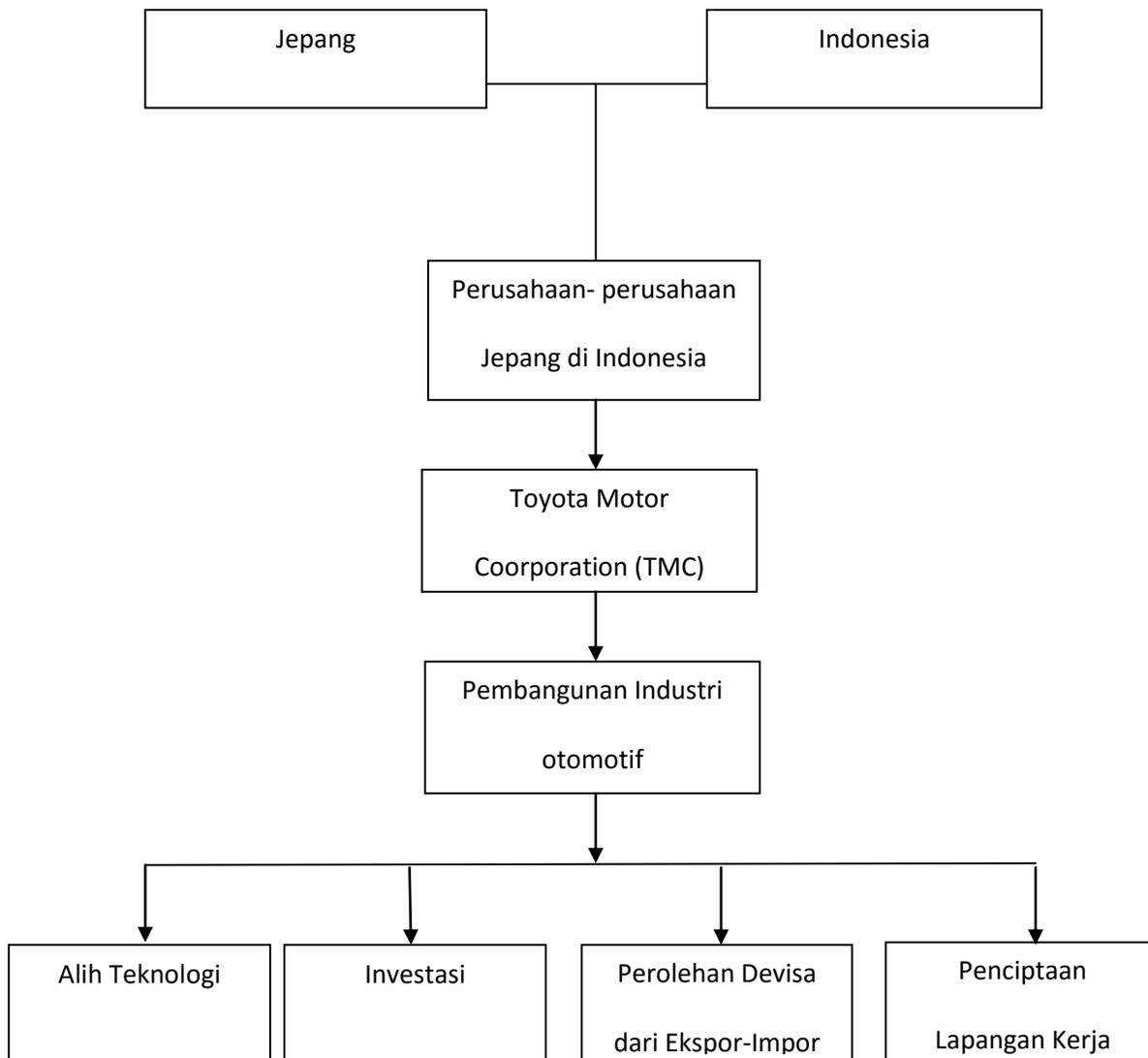
		<p>beroperasi sejak 1973. Kemudian tahun 1977, Toyota mulai mengoperasikan Plant 2 Sunter.</p> <p>Keduanya saat ini difungsikan untuk memproduksi mesin dan komponen dengan kapasitas produksi 195.000 unit mesin TR dan ioron casting sebesar 12.000 ton.</p> <p>Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mesin dan komponen yang diproduksi kedua pabrik ini juga telah dieskpor.</p> <p>Sementara melalui 2 pabriknya yang terintegrasi di kawssan industei KIIC (Karawang Internasional Industiral Estate) Jawa Barat yaitu Plant 1 Karawang yang beroperasi sejak 1998 dengan kapasitas 120.000 unit per tahun dan plant 2 Karawang dengan kapasitas 130.000 unit yang beroperasi sejak 2013 lalu. (<a href="http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/18/118176/toyota-wujudkan-komitmen-perkuat-industri-otomotif">http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/18/118176/toyota-wujudkan-komitmen-perkuat-industri-otomotif-</a></p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>4.Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2011, jumlah karyawan Toyota sebanyak 6.000 tenaga kerja, dan pada tahun 2014 ini telah terjadi peningkatan sebesar 26,7 persen menjadi 7.600 orang. Secara total, jumlah tenaga kerja yang terlibat di rantai bisnis Toyota (supplier lapis 1-3 dan dealer) mencatatkan angka lebih dari 120.000 orang.(: <a href="http://www.toyota.astra.co.id/corporate-information/news-promo/news/ekspor-toyota-capai-70-target-dalam-delapan-bulan/#news">http://www.toyota.astra.co.id/corporate-information/news-promo/news/ekspor-toyota-capai-70-target-dalam-delapan-bulan/#news</a> <a href="http://m.jpnn.com/news.php?id=146627">http://m.jpnn.com/news.php?id=146627</a>)</p> <p>4. Dampak dari pertumbuhan Industri adalah meningkatkan neraca pembayaran, investasi, lapangan kerja baru dan pembangunan daerah disekitar industri yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (<a href="http://www.indopos.co.id/2014/06/dorong-perkembangan-industri-otomotif.html">http://www.indopos.co.id/2014/06/dorong-perkembangan-industri-otomotif.html</a>)</p>
--	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Gambar 1**  
**Skema Krangka Teoritis**

**1. Skema Kerangka Teoritis**



**Judul Penelitian:**

## **Peran Perusahaan Multinasional Toyota dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia**

### **E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Tingkat Analisis**

Menurut Mochtar Mas'ood sebagai adaptasi dari RF Hopkins dan RW Mansbach dalam bukunya yang berjudul *Structure and Process in International Politics* memaparkan bahwa ada tiga tingkat analisis umum yang digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu: 1) Individu dan Kelompok 2) Negara - Bangsa 3) Sistem Regional dan Global. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisis sistem Negara dan Bangsa. Untuk menentukan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi dimana penelitian ini ditekankan pada tingkat analisa reduksionis dimana tingkat unit eksplanasi berada pada tingkat lebih rendah dibanding unit analisis.

#### **2. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang ditetapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang terhimpun. Untuk keperluan penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

##### **a. Metode Deskriptif Analisis**

Yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan secara sistematis suatu peristiwa atau masalah menjadi topic kajian secara sistematis dan mengandalkna analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab akibat dan penyusunan data namun meliputi analisis dan interpretasi data-data. Dalam hal

ini penulis menjelaskan peran dan dampak dari Perusahaan Multinasional Toyota terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan informasi ataupun dokumentasi penulis menggunakan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsip-arsip, laporan-laporan serta data informasi yang diperlukan dari berbagai bahan seperti buku-buku wajib, surat kabar, majalah, artikel, serta makalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Juga melalui media Internet yang berupa ebook, e-jurnal, e-paper dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

## **F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam pembuatan proposal ini sesuai dengan judul dan pembahasannya, penulis mengunjungi lembaga-lembaga maupun institusi-institusi yang penulis anggap penting dalam usaha pengumpulan data dan penelitian skripsi. Adapun lembaga atau instansi yang penulis kunjungi adalah sebagai berikut :

1. Center For Strategic An Internasional Studies (CSIS)  
Jl. Tanah Abang No. 23-27 Jakarta Pusat 10110
2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPPERINDAG)

- Jl.Jendderal Gatot Suebroto Kav. 52-53 Lantai 3 Jakarta 12950
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 44 Jakarta Selatan 12190
  4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung
  5. Perpustakaan FSIP Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung.
  6. Center of Information Scientific Resources and Library Unpad (CISRAL)  
Jl. Dipatiukur No. 65 Bandung.

## **2. Lamanya Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari Februari 2015 sampai dengan bulan bulan Juli yang lebih jelasnya lagi digambarkan pada tabel gambar berikut ini. (lihat halaman berikutnya).



## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB II PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TOYOTA DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan tentang peran perusahaan multinasional Toyota di Indonesia.

### **BAB III PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Bab ini menguraikan tentang pembangunan ekonomi di Indonesia

### **BAB IV PENGARUH PEMBANGUNAN INDUSTRI-INDUSTRI OTOMOTIF PERUSAHAAN MULTINASIONAL TOYOTA DI INDONESIA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan bagaimana pengaruh pembangunan industri-industri otomotif Jepang terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

### **BAB V KESIMPULAN**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil.